

HEGEMONI, PERLAWANAN RAKYAT  
TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI BALI  
Kasus Reklamasi Pantai Padanggalak di Kesiman dan Pembongkaran Kafe  
di Kuta

I Gusti Ngurah Bagus  
Universitas Udayana

**I Pengantar**

Menjelang berakhirnya abad ke-20 di Bali terjadi fenomena yang sangat kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Fenomena itu tampaknya menunjukkan keterkaitannya dengan dekade tersebut yang memiliki kekhasan ialah dengan peristiwa penting yang telah terjadi dalam perjalanan politik maupun ekonomi dan hubungannya dengan aspek-aspek lainnya. Perhatian para sarjana dalam menyikapi fenomena itu sebagai bahan analisis dalam wacana memang telah ada namun secara garis besar analisis yang dilakukan belum sampai pada makna esensialnya. Artinya, apa akar permasalahan yang sebenarnya yang mengandung unsur-unsur yang mempunyai dampak besar pada perkembangan belum terungkapkan<sup>1</sup>). Pada dekade tersebut telah terjadi transformasi yang berkaitan dengan reformasi yang bersumber pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Terjadinya fenomena itu sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik nasional maupun global.

Apabila peristiwa pada dekade itu dicoba dicermati, tampak bahwa semuanya itu tidak terlepas dari dinamika sosial budaya sebagai implikasi dari konsep pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru yang telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun (enam kali Pelita) lebih. Jika dilihat dalam kaitan itu, maka pada dekade 60-an, masyarakat Bali dalam pertumbuhan infrastruktur dalam bidang ekonomi masih sangat tradisional, yakni menekankan pada sektor pertanian dan dapat dikatakan belum signifikan, namun di sisi lain telah dilaksanakan pembangunan, sehingga mengakibatkan telah terjadinya perubahan struktural atau transformasi menjadi masyarakat yang berorientasi pasar, baik pada sektor pertanian, industri kecil, dan pariwisata. Yang terpenting dari perubahan struktural tersebut ialah terjadinya pergeseran kehidupan masyarakat ke arah industri jasa yang dipengaruhi oleh pesatnya

pembangunan pariwisata serta berimbas juga pada industri kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan pendapatan antara sektor pertanian dengan pariwisata pada tahun 1997 ialah 19,33% meningkat menjadi 30,50% (Bagus,1999:624). Angka itu telah menunjukkan bahwa di balik itu masyarakat Bali telah mendiversifikasikan kehidupannya pada sektor jasa dan barang, terutama yang bergerak pada bidang usaha kecil dan menengah serta koperasi. Perubahan ini tampak pula pada sektor-sektor lainnya, seperti pendidikan, pengembangan sosial yang disebabkan oleh Keluarga Berencana (KB) dan yang penting memperlihatkan adanya tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang selalu terus meningkat yaitu tahun 1990 adalah 67,6, menjadi 68,1 pada tahun 1996 yang kemudian menjadi 69,5 pada tahun 1999, dengan demikian mengalami peningkatan per tahunnya rata-rata 2,03% (Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Bali,1999:24-26). Hal ini bukan berarti untuk memberikan makna dalam arti yang esensial terhadap pencapaian dari pemerintah Orde Baru yang telah dilaksanakan secara otoriter dan penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jika keotoriteran ini dikaitkan dengan Bali sebagai sebuah propinsi dari pemerintah Indonesia, maka dapatlah disimak bahwa di Bali tahun 1960-an berkembang sistem kehidupan politik yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri, namun pada zaman Orde Baru telah terjadi depolitisasi dengan konsep *floating mass* (massa mengambang) terutama di pedesaan. Secara politik hal itu memang perlu diungkapkan oleh karena adanya keterpasungan pada masyarakat Bali pada dekade 70-an ke atas, yakni terjadinya pembungkaman massa, atau tidak adanya aktivitas serta pemikiran-pemikiran politik yang mandiri, tetapi justru yang terjadi sebagian besar hanya “pemanutan” terhadap apa yang diperintahkan oleh pemerintah sebagai penguasa tunggal, apalagi pemerintah didukung oleh kekuatan yang berbasis massa, yakni Golkar. Jika dilihat sejak terjang Golkar di Bali sejak awal 1970-an, akan nampak peristiwa seperti “Pembulelengan” atau Golkarisasi yang bermula secara politik di kabupaten Buleleng yang akhirnya menimbulkan beban psikologis penuh ketakutan, ditambah trauma psikologis yang telah terjadi sebelumnya yaitu peristiwa 1965-1966 yakni pembantaian massal para pengikut PKI dan keluarganya dan di samping itu pada awal tahun 1970-an juga terjadi peristiwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang menghancurkan kekuatan PNI. Peristiwa-peristiwa tragis dan mengerikan tersebut telah menumpukan

beban psikologis yang begitu berat bagi masyarakat Bali, sehingga akhirnya bermuara pada munculnya sikap apatis masyarakat Bali terutama dalam bidang politik.

Pentingnya masalah ekonomi dan sisi politik di Bali ini diungkapkan karena pergolakan yang terjadi pada dekade 1990-an bermula dari alur ekonomi terutama disebabkan berkembangnya pariwisata yang bercorak kapitalistis yang kemudian merambah pada ranah politik yang didominasi oleh pemikiran reformasi yakni gerakan yang menentang rezim Soeharto yang sentralistis, birokratis dan otoriter.

Perkembangan pariwisata di Bali memang mengalami naik-turun, terutama yang dimaksud di sini adalah menyangkut perkembangan fisiknya yang antara lain memerlukan tanah. Suatu momentum yang dapat dikatakan sebagai titik awal perkembangan pariwisata secara menyeluruh seperti keperluan tanah adalah diberlakukannya kebijakan yang berawal dari tahun 1985 ialah antara lain adanya kebijakan penerbangan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut diperlukan peningkatan pula dalam bidang fasilitas pendukung, seperti akomodasi, sarana rekreasi, transportasi dan sebagainya. Pertumbuhan tersebut membutuhkan konsep pengembangan pariwisata terpadu (Properti Indonesia No.23 Desember,1995). Konsep inilah yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainya di Bali. Menjelang akhir 1980-an para investor memerlukan tanah yang sangat luas karena mengintegrasikan objek dan daya tarik wisata, akomodasi, restoran, golf dan sebagainya sebagai satu kesatuan dan pengembangan pariwisata terpadu tersebut. Hal ini akhirnya memuncak pada dekade 1990-an terutama di Bali selatan. Harus diakui bahwa reaksi masyarakat terhadap perluasan tersebut yang sangat haus akan tanah bukan semata-mata disebabkan oleh terjualnya tanah kepada konglomerat dengan harga yang relatif tinggi, sehingga menyebabkan termarginalnya masyarakat Bali, tetapi tanah di Bali tidak hanya memiliki nilai material sebagai sumber mata pencaharian semata, melainkan terkait erat dengan aspek kehidupan kekerabatan, agama, pelaksanaan ritus-ritus seperti daur hidup, perayaan-perayaan yang semuanya berhubungan dengan kewajiban keluarga dengan leluhurnya atau keterkaitan masyarakat dengan beberapa aspeknya dengan tanah, bahkan di beberapa tempat tanah terkait pula dengan konsep kehidupan berkomunitas dengan segala aspeknya. Adapula analisis yang mengaitkan dengan kajian ilmiah yang berkaitan dengan daya dukung, karena dengan

adanya segala fasilitas pariwisata, maka akan berkait pula dengan penggunaan air dan tidak boleh dikesampingkan adalah dengan datangnya modal besar yang menguasai tanah, maka tidak kecil kemungkinannya berkait dengan masalah politik yang dapat mempengaruhi berbagai kebijakan yang sangat setrategis, yang akan berimplikasi pada termarjinalnya masyarakat Bali. Jadi dengan demikian, baik dari tinjauan tradisonal maupun tinjauan ilmiah, yang semuanya itu telah menyadarkan tokoh-tokoh masyarakat terutama kaum terpelajarnya di Bali, seperti tokoh-tokoh, baik yang berasal dari masyarakat awam, pemuka agama, memikirkan bagaimana berupaya agar tidak mengakibatkan masyarakat Bali ke arah kehidupan yang sangat fatal. Faktor-faktor inilah yang antara lain menyebabkan munculnya pikiran-pikiran kritis yang mewarnai berbagai gerakanapakah dalam bentuk, protes, imbauan, solusi yang muncul ke permukaan pada dekade 90-an.

## **II. Dua Kasus Perlawanan**

Perlawanan yang terjadi pada akhir masa Orde Baru di Bali yang bermuara pada gerakan anti kapitalisme dan dominasi pemerintah yang berlanjut pada gerakan melengserkan presiden Soeharto, secara komprehensif dapat dipahami lewat bagaimana dominasi yang berupa hegemoni itu terjadi di Bali. Sebagaimana dikatakan di atas, dalam masyarakat Bali yang pada tahun 1970-an mengalami kepatuhan dan kebungkaman secara berlanjut yang dilakukan oleh pemerintah (negara) lewat tindakan represif, adanya *floating mass*, depolitisasi pedesaan, aturan monoloyalitas PNS terhadap Golkar dan sebagainya. Kekuatan ini merupakan koalisi antara militer sejak tahun 1969-1978 (Gubernur Brigjen Soekarmen) dengan birokrat terutama tahun 1978-1988 (Gubernur Prof. Dr. Ida Bagus Mantra) dan terutama puncaknya pada periode tahun 1988-1998 (Gubernur Prof. Dr. Ida Bagus Oka).

Khusus dalam kaitan pariwisata karena sejak awalnya secara sistematis telah dikembangkan, maka masyarakat, terutama dalam hal ini birokrasi lewat koprasinya melirik sektor pariwisata ini karena sangat menjanjikan. Peristiwa ini terjadi terutama di daerah Bali Selatan dengan pusat perkembangannya di kabupaten Badung yang memiliki wilayah Sanur dan Kuta, yang menjadi pusat pengembangan pariwisata di wilayah kabupaten Badung. Pada kasus kedua tempat itu terindikasi kuat adanya hegemoni yang

dilakukan oleh pihak militer dan para birokrat. Seperti diketahui bahwa pada dekade 1980-an bupatinya dari militer serta dipihak lain gubernurnya dari Universitas Udayana yakni Prof. Dr. Ida Bagus Oka.

Sebagaimana dikatakan di atas, akhirnya tanah menjadi “sesuatu yang maha penting” lewat pengembangan pariwisata yang menjadikan tanah sebagai sesuatu yang sangat berharga. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah wilayah di daerah Badung Selatan yakni di Bukit Jimbaran yang satu wilayah dengan pengembangan Nusa Dua, yang mulanya tidak begitu berharga, namun tiba-tiba menjadi lirikan para investor yang terutama berasal dari luar Bali, dan dalam hal ini termasuk dengan keluarga Cendana. Tanah-tanah disekitar wilayah itu sesungguhnya masih banyak yang berstatus tanah negara. Salah satu kebijakan dari Gubernur Ida Bagus Oka dengan persetujuan DPRD adalah membagikan tanah-tanah negara itu kepada para pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan oleh para pejabat yang mendapat bagian tanah itu, kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi, sehingga para pegawai tersebut menjadi kaya mendadak. Tindakan itu telah memicu ketidakpuasan masyarakat, terutama dimotori oleh kaum intelektual yang menganggap lewat hegemoni itu telah menimbulkan tindakan-tindakan dan menumbuhkan sikap ketidakadilan di masyarakat Bali.

Dengan latar belakang perkembangan pariwisata yang membutuhkan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat atraksi, pendirian hotel, restoran, golf dan sebagainya. Melalui konsep inilah hegemoni pemerintah memuluskan proyeknya yang dioperasikan lewat ranah koperasi yang dimiliki oleh pemda sendiri yakni Koperasi Praja (milik Pemda Tingkat I Bali) dan Puskopad dan Primkopad (milik Kodam IX Udayana). Lewat kedua jenis koperasi inilah pemerintah dan tentara mengincar kawasan-kawasan yang kemungkinan memberikan keuntungan untuk kepentingan kaumnya. Inilah fenomena hegemoni yang secara riil dapat dilihat secara kasat mata yang dapat berinteraksi dengan masyarakat dan akhirnya menimbulkan gerakan tandingan melawan hegemoni tersebut (bandingkan, Sigit Rochadi,1999:253-254; Frans Parera dan T. Jacob Koekerits,1999; Roger Simon,2000).

Sebagaimana pula yang dikatakan di atas, bahwa pariwisata yang dikembangkan di Bali yang sangat kapitalistis, lewat pengembangan kawasan pariwisata terpadu, jelas membutuhkan tanah yang sangat luas untuk pembangunan hotel, restoran, sarana rekreasi

dan sebagainya menjadi satu kesatuan. Keadaan ini sangat mendominasi perkembangan pariwisata, sehingga muncul calo-calo tanah yang bergentayangan yang secara nyata berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah lokal yang berawal pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten. Seberapa jauh tanah-tanah itu telah berpindah tangan dari masyarakat ke investor, secara pasti dalam perhitungan angka belum dapat diperoleh, namun penjelasan dari pemerintah waktu itu menyebutkan sekitar 1000 hektar tanah telah dikonversi dari tanah pertanian menjadi non-pertanian untuk pemenuhan pembangunan. Reaksi yang semakin memanas di kalangan masyarakat Bali terjadi pada awal tahun 1990-an yang diletupkan melalui peristiwa yang sangat terkenal yaitu kasus Bali Nirwana Resort (BNR). Pada saat itu telah terjadi protes keras yang dipelopori oleh kalangan intelektual, kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok kepentingan yang dipelopori oleh kelas menengah, apabila dilacak perkembangannya memang secara historis seperti apa yang dimaksudkan dalam sejarah dengan istilah elite telah muncul tahun 1920-an di Bali yang juga membawa pemikiran dan gerakan baru yang merubah masyarakat dengan turut mewarnai dinamika masyarakat di Bali. Kaitannya dengan perlawanan ini peranan yang besar dimainkan olehnya adalah sokongan mereka terhadap masyarakat desa adat atau komunitas desa yang telah sejak berabad-abad memiliki corak kemandirian terutama dalam hal adat dan upacara agama (Warren,1993). Keterkaitan adat dan upacara agama inilah yang menjadi dasar pijakan bagaimana mereka memiliki alasan kuat untuk menentang hegemoni lewat koperasi yang didirikan oleh pemerintah dan militer tersebut. Dengan kata lain kekuatan kelas atau elite baru dan kekuatan tradisonal inilah yang bersatu melawan hegemoni itu yang dalam strategi perjuangannya mengambil pijakan kuat yang sulit dilawan karena bersumber pada adat, upacara dan agama. Mereka itu melakukan perlawanan terhadap mega-proyek Abburizal Bakkrie lewat BNR-nya. Pada waktu itu untuk pertama kalinya protes itu dilakukan secara besar-besaran dan sangat radikal, militan yang akhirnya melibatkan pihak penguasa (Presiden Soeharto) yang menurunkan “bisama”-nya.

Perlawanan itu sangat alot dengan pihak investor (Aburizal Bakkrie), meskipun demikian perjuangan masyarakat Bali menentang hegemoni , tetapi belum menemukan hasil atau dengan kata lain proyek pembangunan BNR tetap berjalan, dengan kata lain perlawanan menemui jalan buntu atau gagal. Walaupun gagal tetap memiliki arti

tersendiri dalam catatan sejarah gerakan sosial di Bali, yakni adanya kesadaran politik, yang memunculkan perasaan was-was, ketakutan dan tanpa disadari bahwa inilah yang akhirnya menjadi bumerang akan kehancuran budaya Bali artinya secara ekonomi berarti masyarakat Bali tidak menjadi tuan di rumah sendiri seperti pada zaman agraris. Ketika kapitalis pariwisata muncul, maka masyarakat Bali menjadi marjinal baik dalam bidang terutama ekonomi. Kondisi umum seperti inilah yang secara evolutif menumbuhkan iklim kondusif tentang perlawanan-perlawanan yang muncul kemudian terhadap perkembangan pariwisata.

Kalau dalam kasus BNR adalah mengalami kegagalan, namun dalam dua kasus (lihat: Peta) yang akan dipaparkan di bawah ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya yang terjadi ketika masih kuatnya dominasi dan hegemoni negara dan pemerintahnya. Perlawanan, baik yang gagal dan yang menang ini tidak dapat dilepaskan dari peranan pers terutama yang dipelopori oleh pers lokal Bali Post yang merupakan pers tertua di Bali.

## **2.1 Kasus Reklamasi Pantai Padanggalak di Desa Adat Kesiman<sup>2</sup>)**

Sebagaimana di katakan di atas, bahwa para investor telah melihat prospek dari usaha yang bersumber pada sektor pariwisata yang berada di kawasan pinggir pantai, oleh karena pantai memiliki potensi dan nilai strategis yang multifungsi artinya pantai bisa untuk tempat aktraksi dan juga rekreasi. Di antara pantai-pantai yang memiliki potensi dan nilai strategis yang menjadi incaran para investor berada di kawasan pantai Sanur dan termasuk dalam wilayah desa adat Kesiman yaitu pantai Padanggalak.

Padanggalak sebagai daerah yang dikembangkan sebagai daerah pariwisata merupakan imbas dari pantai Sanur yang ada di sebelah selatannya. Daerah ini sebelumnya telah dikembangkan menjadi proyek pariwisata seperti “Gelanggalang Renang Penyu Dewata”, Taman Festival Bali (TFB) yang pembangunannya rampung tahun 1997, kemudian datang investor PT Massaja mendirikan hotel dan restoran Jepang, tetapi gagal karena ditinggal pemiliknya dan lain sebagainya. Di sebelah Selatan inilah ada kawasan pantai yang masih menjadi tanah negara yang menurut informasi Badan Pertanahan Nasional jumlahnya sekitar 17,075, tetapi jumlahnya terus menyusut akibat abrasi. Tanah negara ini kemudian dilirik oleh Pemda Tingkat I Bali, sebab sangat menguntungkan

pihak Pemda Bali. Maka untuk menguasai tanah itu Pemda Bali memberikan hak dan wewenang kepada Koperasi Praja (miliki Pemda I Bali) untuk mengelola pantai Padanggalak ini, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 593/8399/Perwat, tanggal 1 Mei 1991 dan disetujui oleh DPRD Bali melalui Surat Keputusan DPRD Bali Nomor 06/KPTS/DPRD/1991 tanggal 26 Agustus 1991. Melalui kerja samanya dengan PT Graha Sanur Dinamika (GSD), Koperasi Praja mulai melakukan aksinya yaitu melakukan penimbunan (*karangisasi*) yang tidak lain adalah reklamasi, sehingga direspons dengan protes keras oleh masyarakat desa adat Kesiman terutama melalui *bendesa adat* setempat Drs. I Made Karim.

Namun dengan dalih melakukan kerjasama, Koperasi Praja mengalihkan pengelolaan ini kepada PT Graha Sanur Dinamika (GSD), dengan mengantongi izin prinsip dari Gubernur Bali (Ida Bagus Oka) dengan surat bernomor 556.2/15453/Bina Ek tertanggal 30 September 1996 tentang pembangunan hotel melati lalu diperpanjang tahun 1997 dengan surat nomor 5562.2/90962/Bina Ek. Maka sejak itulah mulai PT GSD mulai mereklamasi pantai Padanggalak dengan dalih mengembalikan tanah yang mengalami abrasi, ini dilakukan pada tahun 1997.

Diawali oleh arogansi para calo terhadap monopoli yang telah dilakukan itu, maka munculah reaksi terutama yang dilakukan oleh kaum intelektual yang mengkritisi pelaksanaan proyek reklamasi pantai tersebut, karena pelaksanaan proyek itu tidak mendapat persetujuan dari masyarakat desa Adat Kesiman. Argumentasi yang memperkuat resistensi masyarakat desa Adat Kesiman terhadap PT GSD adalah karena wilayah pantai Padanggalak tersebut tempat melakukan upacara agama Hindu seperti untuk *melasti* (penyucian *buana agung*/kosmos; melalui benda-benda keramat dan *buana alit* ; manusia itu sendiri) yang berasal dari berbagai pura di sekitar wilayah desa Adat Kesiman. Di samping kegiatan *melasti*, juga untuk upacara lainnya seperti upacara *nganyut* (upacara pembuangan abu jenazah ke laut), dan sebagainya. Pada waktu persilangan pendapat antara PT GSD dan masyarakat desa Adat Kesiman, ini merupakan reaksi awal dari perlawanan tersebut, yang akhirnya mendapat dukungan dari kelompok-kelompok berkepentingan (*interest groups*), seperti Forum Pemerhati Hindu Dharma Indonesia, para agamawan dan tokoh-tokoh masyarakat.



Dalam pada itu di satu sisi proyek reklamasi berlangsung dengan menggunakan alat-alat berat (pengerukan), di sisi lain gelombang reaksi masyarakat untuk melawan investor kian memanas. Sejumlah kelompok masyarakat, cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya sangat menyayangkan sikap pemerintah (Gubernur) yang secara sewenang-wenang tanpa melalui kompromi dengan masyarakat memberikan izin kepada investor “mencemari” tempat suci umat Hindu di pantai Padanggalak. Sikap sewenang-wenang ini dilawan oleh masyarakat dengan berbagai tuntutan. Semua tokoh-tokoh desa adat Kesiman melakukan protes kepada Gubernur Ida Bagus Oka, yang dimotori oleh A.A. Ngurah Kusuma Wardana orang yang sedesa dengan Gubernur berteriak lantang “Ida Bagus Oka sebaiknya mengundurkan diri” (Suetha,1999:132).

Kusuma Wardana adalah bangsawan setempat yang memiliki karisma/wibawa. Semua itu tidak terlepas dari kiprah leluhurnya yang pernah menjadi raja di Badung pada pertengahan abad ke-19 dan sangat berperan dalam sejarah Bali karena memiliki hubungan dengan pedagang yang terkenal bernama M.Lange yang mempunyai usaha di pantai Kuta (Weiner,1995). Di samping di masa revolusi puri dan tokohnya yaitu ayahnya adalah menjadi salah seorang pejuang turut ambil bagian pada awal revolusi. Yang terpenting dia aktivis Pemuda Panca Marga (PPM) yang pernah duduk di DPRD Kodya Denpasar, namun menjelang runtuhnya rezim Soeharto, berbalik menjadi tokoh yang kritis terhadap Golkar bahkan mengundurkan diri dari anggota DPRD Kodya (PPM afiliasi ke Golkar), dan karena itulah akhirnya dia menjadi tokoh yang vokal dengan dukungan kelompok-kelompok lainnya. Gerakan perlawanan ini juga berhasil menurunkan Komnas HAM yang merupakan jawaban atas pengaduan warga masyarakat ke Komnas HAM tanggal 17 Oktober 1997. Taktik perlawanan Kusuma Wardana cukup strategis dan kokoh, oleh karena mengandeng kaum intelektual kampus, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, Desa Adat Kesiman dan LSM. Mereka satu visi dalam melancarkan gerakan menentang reklamasi tersebut.

Beriringan dengan proyek reklamsi itu, ada pula kemudia muncul investor PT Petualangan Langit Biru (PLB) yang bermaksud membangun fasilitas kepariwisataan berupa olah raga kedirgantaraan (*aerosport*) yang menggunakan pesawat *ultralight*. Proyek ini bermaksud membuat landasan terbang pesawat *ultralight* yang berukuran 50 M X 270 M, letaknya memang bukan di pantai Padanggalak, tetapi jauh ke selatan pada

sebidang tanah milik PT Surya Chandra Permai. Proyek ini juga mendapat protes keras dari berbagai kelompok masyarakat, intelektual, tokoh-tokoh masyarakat, kaum agamawan, dengan dalih bagaimana jika pada saat ada upacara agama, tiba-tiba di atasnya terbang pesawat tentu ini sangat mengganggu keheningan, kekhusukan orang yang melakukan upacara agama (*yadnya*) dan persembahyangan di pantai Padanggalak. Salah satu kebulatan tekad masyarakat mengadakan rapat di desa adat Kesiman tanggal 20 Oktober 1997 menghasilkan enam butir keputusan yaitu (1) menuntut agar semua pihak ikut melestarikan pantai Padanggalak, (2) karena fungsinya desa Adat menuntut agar reklamasi segera dihentikan, (3) pantai itu harus dikebalikan seperti semula, (4) setelah kembali segera dilakukan upacara penyucian kembali, (5) semua orang harus menghormati pantai Padanggalak sebagai kawasan suci bagi umat Hindu, (6) Diserahkan kembali pengelolaan pantai itu dari koperasi Praja dan PT GSD ke desa Adat Kesiman. Dengan adanya perlawanan tersebut ternyata membuahkan hasil yang diharapkan yaitu kawasan Pantai Padanggalak dikembalikan seperti semula. Perlawanan ini cukup alot terutama perlawanan terhadap hegemoni pemerintah daerah (Gubernur) yang secara kronologis telah berawal dari tahun 1990 hingga 1997 (lihat Bali Post, 31 Oktober 1997).

## **2.2 Kasus Pembongkaran Kafe di Pantai Kuta**

Sejak dikenalnya Kuta sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Bali, membawa konsekuensi Kuta menjadi serbuan para pencari kerja di sektor formal dan informal. Nama Kuta semakin mendunia, sehingga sangat menggiurkan, bukan saja bagi wisatawan, tetapi juga para pemilik modal yang ingin berinvestasi di Kuta khususnya di bidang jasa pariwisata. Yang ingin berinvestasi di Kuta, tidak saja dari kalangan investor luar, dan dalam negeri, melainkan juga kelompok lokal Bali. Salah satunya adalah masuknya Puskopad dan Primkopad dan Pemda Badung dalam pengelolaan objek wisata pantai Kuta yang melahirkan kebijakan “Puskopad dan Prikopad kerjasama dengan Pemda Badung dalam pengelolaan objek wisata pantai Kuta, sejak tahun 1989 dan baru akan berakhir tahun 2009 mendatang. Dengan demikian maka, kurang lebih 20 tahun Desa Adat Kuta akan kehilangan pengelolaan objek wisatanya. Desa Adat Kuta bagaikan “ayam mati di lumbung padi”, hidup dalam bayang-bayang kemewahan semu, namun untuk bergolak situasi politik yang tidak mengizinkan,

Jika disimak kasus Kuta tersebut secara sosial-politik, tampaknya di era 1980-an, secara politik Orde Baru sedang kuat-kuatnya berada pada puncak kekuasaan yang didukung oleh Golkar dan militer yang diterapkan melalui jalur birokrasi dari tingkat paling atas sampai pada tingkat yang terbawah, telah mampu menanamkan ideologi tunggal, lewat jargon-jargon politik, pembangunan, pemerataan, stabilitas, dan sebagainya. Pada era 1980-an inilah militer lewat koperasinya masuk dengan kuatnya sebagai kekuatan politik Orde Baru yang mampu membungkam, masyarakat Kuta, termasuk dalam suatu jaringan kekuatan tersebut. dengan masuknya koperasi tentara/militer dalam kancah industri pariwisata untuk meraup keuntungan, tanpa peduli siapa pun yang memiliki lahan yang digunakan. Hal tersebut tampak kerjasama Pemda Badung dan Puskopad sebagai bukti bahwa Pemda Badung telah mengintervensi kemandirian desa Adat Kuta, yang mempunyai hak wilayah terhadap pantai Kuta sebagai objek wisata di daerahnya. Pada tahun 1989 terjadi pembuldozeran bangunan di sekitar pantai Kuta. Hal ini dilakukan dengan dalih pelaksanaan lomba terjun payung internasional, oleh karena itu kawasan pantai Kuta harus bersih dari berbagai fasilitas umum yang ada termasuk pepohonan yang dinilai ketinggiannya mengganggu kenyamanan peserta lomba terjun payung tersebut. Bangunan *locker & safety box* (tempat penitipan barang dan pakaian) wisatawan yang dikelola LKMD Kuta dengan kelengkapan restoran, toilet dan bar dibongkar rata. Padahal tempat itu merupakan penghasilan penting bagi LKMD Kuta. Namun apa boleh buat demi untuk kepentingan negara yang mengadakan lomba terjun payung internasional. inilah pembongkaran terpadu di daerah rupanya lewat rekayasa politik ranah olah raga, untuk tujuan penguasaan wilayah Kuta yang sangat menjajikan keuntungan. Inilah hal ikhwal atau asal mula adanya titik-titik api ketidakpuasan masyarakat Kuta, yang merasa haknya diberangus oleh kekuatan luar desa adat Kuta. Titik-titik api ini tetap memungkinkan akan adanya letupan, hanya saja menunggu sistuasi yang mendukung

Meskipun kondisi atau situasi politik belum berubah namun titik-titik api yang telah lama terpendam di hati masyarakat desa adat Kuta, akhirnya mulai dihembuskan oleh angin kebebasan yang sedikit terbuka. Reformasi sebagai keran kebebasan belum dibuka perlawanan terhadap ketidakadilan pun ditabuh, tetapi masyarakat desa adat Kuta sudah membuka jalan ke arah reformasi. meskipun baru kedengaran sebatas langkah.

Tahun 1996 warga Kuta mulai “mengobok-obok keberadaan lembaga formal dan informal yang menguasai lahan berpasir putih di pantai Kuta, dengan dasar pola kerjasama pengelolaan antara Pemda Badung dan Pusat Koperasi TNI-AD (Puskopad) Kodam IX Udayana. Jangka waktu kesepakatan kerjasama itu memang tidak tanggung-tanggung seperti dikatakan di atas yaitu selama 20 tahun terhitung sejak 1989. Perjuangan warga desa adat Kuta untuk meminta kembali tanah *palemahan*/wilayah mereka di era 1996, belum membuahkan hasil dan kembali warga desa adat Kuta menelan pil pahit, oleh karena masih kuatnya kekuasaan Orde Baru pada masa itu. Kekecewaan tersebut kembali dialami oleh masyarakat Kuta, namun demikian perjuangan mereka masih berjalan, walaupun masih tersembunyi.

Situasi politik mengalami titik balik, sejak dilengserkannya Soeharto dari kursi kepresidenan Mei 1998. Sejak itu keran kebebasan yang tertuang dalam konsep reformasi digulirkan, semua kekuatan-kekuatan yang awalnya menikmati kemewahan Orde Baru mulai kehilangan pegangan, bahkan banyak meraka yang ingin mencari selamat dengan berbalik haluan yang menyebut dirinya reformis. Situasi seperti ini memungkinkan orang atau kelompok orang untuk menyuarakan isi hatinya, haknya demi keadilan. Rupanya momentum reformasi inilah yang akhirnya menjadi titik puncak perjuangan warga Desa Adat Kuta dalam mengakhiri kekuasaan Puskopad dan intervensi Pemda terhadap pengelolaan pantai Kuta. Akumulasi kekecewaan warga masyarakat desa Adat Kuta mendapatkan saluran, sehingga akhirnya sulit dibendung dan tumpah-ruah dalam suasana pembongkaran kafe-kafe di sepanjang pantai Kuta yang dikelola oleh Puskopad. Kajadian ini terjadi sekitar Mei 1999 sebagai pucak dari gerakan warga Kuta terhadap hegemoni, meskipun dalam perjanjian kerjasama tersebut belum berakhir dan baru berakhir tahun 2009 mendatang.

Peristiwa pembongkaran kafe-kafe (belasan kafe) tersebut harus dicerna dan diintrospeksi oleh Puskopad sebagai pengambilalihan wilayah orang. Mengapa masyarakat Kuta menuntut keluarnya Puskopad dari Kuta, tentu pertanyaan yang mestinya tidak perlu dijawab oleh orang lain, namun harus direnungkan oleh Puskopad sendiri. Apa dasar Puskopad sampai bias mengelola pantai Kuta selama ini, berapa keuntungan yang telah diperoleh dari Kuta, untuk siapa keuntungan itu dan sebagainya. Dengan demikian maka, dengan hati yang lapang, meskipun sedikit pahit, toh Puskopad

Itelah menikmati keuntungan yang lama, maka Puskopad menyatakan keluar dari pengelolaan pantai Kuta. Setelah sepuluh tahun pantai Kuta dikelola oleh Puskopad (mulai 1989), Jumat 7 Mei 1999 diserahkan kembali kepada Pemda Badung. Hal ini dilakukan kerana penyerahan pengelolaan kepada Puskopad 1989 (waktu kepemimpinan Bupati Kolonel Pande Made Latra), dilakukan secara formal, pengembaliannya juga secara formal lewat perjanjian. Pada tanggal 11 Mei 1999 pantai Kuta diserahkan pengelolaannya kepada desa adat Kuta.

### III Simpulan

Dari uraian di atas, masyarakat Bali yang berbasiskan organisasi tradisional/-masyarakat desa dan kelompok-kelompok kepentingan yang berbasiskan kelas menengah seperti kelompok cendekiawan, forum, ilmuwan dan sebagainya telah berani mengkritisi serta melakukan perlawanan terhadap hegemoni pemerintah dengan berbagai jalannya dalam situasi masih kuatnya kekuasaan Orde Baru yaitu hal yang tidak disangka-sangka dalam keadaan masyarakat Bali yang trauma terhadap masa lalunya, serta kemudian adanya politik pemerintah yang menghegemoni tidak saja dalam bidang politik, tetapi juga bidang ekonomi, kegiatan kebudayaan, sehingga masyarakat Bali menjadi apatis (*koh ngomong*) dan cenderung berlaku pasrah terhadap hegemoni tersebut (jangan melawan arus). Keberanian itu muncul karena berbagai faktor antara lain; orang Bali merasa mulai dirinya termarginal dalam berbagai aspek kehidupan, karena tanah dirasa tidak lagi di dalam tangan masyarakat Bali melainkan telah berpindah tangan ke investor yang terutama yang bergerak dalam bidang pariwisata.

Beralihnya masyarakat dari kebudayaan agraris kepada industri jasa ini ditakuti bahwa dalam peralihan itu kedaulatan dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan diasumsikan tidak akan berada di tangan masyarakat Bali dan itu berarti ketergusuran yang fatal. Inilah antara lain salah satu pokok, mengapa munculnya keberanian (*jeg bani*), yang dikondisikan pula oleh sistem politik rezim Soeharto, yang menerapkan kebijakan diskriminatif, terutama keberpihakan pada kaum mayoritas dan tidak begitu mempedulikan/memperhatikan kaum minoritas khususnya dalam bidang agama<sup>3</sup>). Kemudian apabila muncul perlawanan dalam bidang politik terutama di tingkat pusat terhadap Soeharto, maka ketidakpuasan inipun berkembang menjadi keberanian untuk

menentang pemerintah Orde Baru. Perlawanan ini sejauh yang diketahui sampai kini terutama dalam pariwisata, hasilnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu (1) Perlawanan yang gagal di pihak masyarakat, (kasus BNR), (2) perlawanan yang menggagalkan investor atau kemenangan di pihak masyarakat (Kasus Padanggalak, Kuta), dan (3) perlawanan yang berakhir dengan kompromistis (artinya sama-sama memberikan penyelesaian keuntungan baik pihak pemerintah maupun masyarakat antara lain kasus pengelolaan objek Wisata Alas Kedaton, di desa Kukuh, Tabanan (baca: Palguna,2001).

Melihat permasalahan yang muncul dalam hubungan antara negara dan masyarakat yang terjadi di pelbagai daerah di Indonesia di era 1990-an yang menimbulkan perlawanan, maka diperlukan kajian yang mendalam yang memberi ruang dialog seperti yang dilakukan oleh para sejarawan Indonesia terhadap radikalisasi petani di pedesaan<sup>4</sup>)

#### **Catatan:**

---

<sup>1</sup> Dalam hubungan ini diberikan penjelasan terhadap buku yang terbit pada tahun 1999 dengan judul *Staying Local in The Global Village Bali in the Twentieth Century*, Raechelle Rubinstein dan Linda H. Connor (ed). University of Hawai'i Press Honolulu. Terutama pada *Introduction* halaman 1-14. Seolah-olah para sarjana Indonesia (Bali) sendiri terjebak ke dalam *Bali as Paradise (inward looking gaze)*, padahal sebenarnya sebagaimana penulis sudah nyatakan bahwa tidaklah seluruhnya demikian, bahwa kita pun (sarjana Indonesia) memiliki pandangan kritis dan mengaitkan masalah-masalah Bali dengan keadaan nasional dan global. Hal itu bukan saja berkembang dalam pemikiran tetapi juga dalam tindakan yang mengkritisi masalah-masalah politik, ekonomi dan budaya. Hal itu terjadi terutama pada dekade terakhir sebagaimana terurai dalam tulisan ini dan juga pada tulisan-tulisan penulis yang bertebaran dari dekade 1980-an.

<sup>2</sup> Tulisan tentang Kasus Padanggalak ini telah dijadikan Tesis S2 Kajian Budaya oleh I Ketut Suetha, 1999.

<sup>3</sup> Orang Hindu terutama di Bali merasa dirinya dianaktirikan oleh Presiden Soeharto, karena Yayasan yang dipimpin untuk membangun tempat ibadah, tidak pernah diberikan kepada umat Hindu. Kebijakan Presiden dalam hal ini mengakibatkan umat Hindu merasakan dirinya diminoritaskan. Hal yang serupa dirasakan pula oleh etnis Tionghoa (baca: Mely G Tan,2000. Bahasa dan Politik Rekayasa pada Zaman Orde Baru, halaman 86. Dalam *Kajian Serba Lingusitik Untuk Anton Moeliono Pereka Bahasa*. Bambang Kaswanti Purwo Editor. Jakarta: Unika Atma Jaya kerjasama BPK Gunung Mulia.

<sup>4</sup> Perlawanan terhadap Orde Baru tampak dalam berbagai aspek yang muncul dalam pemakaian bahasa seperti plesetan, lelucon, kartun, puisi, dan sebagainya. Aspek-aspek ini apabila dikaji secara kritis sebagaimana dilakukan oleh kajian ilmu bahasa yang mampu melahirkan apa yang disebut ilmu bahasa kritis yang mengulas hubungan struktur bahasa dengan struktur masyarakat (bahasa dan kekuasaan).

---

## Bibliografi

- Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Bali,1999. *Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Bali Tahun 1999*. Denpasar: Bappeda Propinsi Bali Kerjasama BPS Propinsi Bali.
- Bagus, I Gusti Ngurah,1999. “Keresahan dan Gejolak Sepuluh Tahun Terakhir di Bali; Beberapa Catatan tentang Perubahan Sosial di Era “Glokalisasi”Dalam *Panggung Sejarah Persembahkan Kepada Denys Lombard*. Henry Chambert Loir dan Hasan Muarif Ambary editor. Ecole Francaise d’Extreme Orient Pusat Penelitian Arkeologi Nasional:Yayasan Obor Indonesia.
- Bali Post*, Tanggal 31 Oktober 1997. “Dari Padanggalak ke Jalan Melati”
- Carol, Warren,1993. *Adat And Dinas Balinese Communities in The Indonesian State*.Oxford University Press.
- Palguna, A.A Ngurah,2001. *Dinamika Masyarakat Desa Menuju Masyarakat Kewargaan (Studi Kasus Pengelolaan Objek Wisata Alas Kedaton di Desa Kukuh Kecamatan Marga kabupaten Tabanan)*. Tesis S2. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya, Universitas Udayana.
- Parera, M dan T. Jacob Koekerit (Ed),1999. *Opini Masyarakat-Dari Krisis Ke Reformasi, Masyarakat Versus Negara, Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara. Debat Publik Seputar Paradigma Kehidupan Bermsayarakat*. Jakarta: Kompas
- Properti Indonesia Membedah Bisnis Mega Resor*,1995, No.23 Edisi Desember.
- Rochadi, Sigit, 1999. “Perlawanan Rakyat Terhadap Negara: Kasus Indonesia di Era Orde Baru”. Dalam *Analisis CSIS, Dinamika Pemilu 1999*, No.3 Tahun XXVIII.
- Rubinstein, Raechelle and Linda H. Connor (ed),1999. *Staying Local in The Global Village, Bali in the Twentieth Century*. Honolulu: University of Hawai’I Press.
- Simon, Roger,2000. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Suetha, I Ketut,1999. *Gerakan Masyarakat Sipil (Studi Kasus Padanggalak Akibat Pariwisata di Desa Adat Kesiman)*. Tesis S2. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya, Universitas Udayana.

---

Tan . Mely G, 2000. “Bahasa dan Politik Rekayasa pada Zaman Orde Baru”. Dalam *Kajian Serba Linguistik Untuk Anton Moeliono Pereka Bahasa*. Jakarta: Unika Atma Jaya kerjasama BPK Gunung Mulia.

Weiner, Margaret J, 1993. *Visible and Invisible Realms, Power, Magic and Colonial Conquest in Bali*. Chicago The University Press.